

## DEWAN PENDIDIKAN DI TENGAH PUSARAN COVID-19

**Kholilur Rahman**

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia  
ilur66@gmail.com

<b>ABSTRACT:</b>	<i>It is probably almost a consensus of experts that the Covid-19 pandemic is an undiscovered virus, and its negative impact touches almost the entire joints of human life; Social, economic, banking, tourism, and education. The impact of the life joints mentioned at the beginning may be overcome by certain stimuli and within a certain period of time can be recovered. But the impact that touches the joints of the last Life (education), especially related to the quality of education, the Resolution requires "collective ijtihad" with a wide range of perspective, and must be sustained by the comprehensive stimulus. Given the whole quality of the joints of human life is determined by the quality of education.</i>
<b>Received:</b> August 09 <sup>th</sup> 2019	<i>In order to collective ijtihad against the impact of the Covid-19 in this field of education, there is an honorable institution that loses its "fangs". The Board of Education (especially the District Education Council) as a representation of the community in the field of education should present contribute its role to help the heavy burden of society in education, especially in the midst of the Covid-19 vortex and its impacts,</i>
<b>Revised:</b> September 16 <sup>th</sup> 2019	<i>The Board of Education must be able to attend: (a) as a advisory agency for local governments in the determination of the implementation of education policies, especially during the pandemic Covid-19 period; (b) As supporting agency, whether financial, thinking or energy for exclusivity in the organizing of education; (c) As a controlling agency for the education policy of the local government; and (d) as a mediator agency on policies implemented by exclusivity and legislative</i>
<b>Accepted:</b> November 17 <sup>th</sup> 2019	
<b>Keywords:</b>	<i>Impact of Covid-19, Education Quality, Education Council role</i>

### PENDAHULUAN

Teringat masa kecil dulu, orang tua saya sering mendengarkan dua pesan mulia “*le...sekolah/ golek ilmu sing benner yo...ben dadi wong pinter tur benner...!*” (nak... kamu sekolah/cari ilmu yang baik ya, biar kelak jadi orang pandai dan pintar). Satu pesan lagi yang sering disampaikan ketika seorang anak berbuat nakal atau dianggap kurang baik, orang tua saya menegor “*ngono kok jarene wis sekolah*” (begitu kok katanya sudah sekolah).

Sadar dibalik ucapan tersebut terkandung nilai dan harapan orang tua, bahwa orang tua memiliki harapan besar dengan menyekolahkan anaknya kelak menjadi orang pandai, orang baik, dan orang benar. Bahkan, sadar atau tidak, orang tua menyekolahkan anaknya sebagai upaya investasi bagi dirinya, keluarga dan anak yang bersangkutan, khususnya pesan menjadi anak sholih agar kelak mampu mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah menghadap Allah. Swt.

Penggalan pesan mulia di atas menyadarkan kita, bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia untuk masa depan, dan dalam ruang yang lebih luas untuk pembangunan bangsa,

yaitu warga negara yang disiapkan membangun dan mengisi cita-cita dalam mencapai tujuan bangsa. Hal ini sinergi dengan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>1</sup>.

Tujuan tersebut akan tercapai apabila ditopang dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan lanjutan yang muncul “mampukah kita mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas di tengah-tengah pusaran dampak negative Covid-19 terhadap sistem pendidikan nasional..?”, Lalu di mana peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam kondisi negara atau daerah yang sedemikian rupa ?”

Pandemi Covid-19 tidak hanya aspek sosial dan ekonomi, namun pada gilirannya mulai merambah dunia pendidikan. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan melibatkan seluruh lembaga pendidikan, dan menggantikannya dengan pembelajaran *online* dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus corona. Virus ini belum ditemukan obatnya, yang bisa ditempuh hanya melakukan pencegahan melalui gerakan *social distancing* dan *physical distancing*.<sup>2</sup>

Gerakan ini dipertegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia meminta agar masyarakat melakukan *social distance* guna mencegah penularan virus corona atau Covid-19 (Minggu (15/3/2020) Jokowi juga meminta agar masyarakat untuk tidak panik. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar, seperti bekerja, belajar dan beribadah bisa dilaksanakan di dalam rumah. Dalam pernyataannya ditegaskan "Saat ini yang penting *social distance*, menjaga jarak. Dengan kondisi itu, kita kerja dari rumah, belajar dan ibadah di rumah,"<sup>3</sup>

Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya, hal ini dapat meminimalisir menyebarnya penyakit Covid-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit Covid-19 ini, kebijakan *lockdown* atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses pada penyebaran virus corona.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unesco, saat ini total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. China

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3,

<sup>2</sup> Suatu gerakan yang kumandangkan oleh *World Health Organization (WHO)* untuk mencegah penyebaran virus corona : *social distancing*, atau menjauhi kerumunan orang, dan *Physical distancing* artinya menjaga jarak fisik antar manusia. Lihat Reportase wolipop.detik.com , Selasa, 24 Mar 2020 15:34 WIB: <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4951544/social-distancing-diubah-jadi-physical-distancing-cegah-corona-ini-maksudnya>, diakses tanggal 06 Mei 2020, 21:20 Wib

<sup>3</sup> Lihat Reportase detik.com” *Tentang Social Distance, Cara Pemerintah Cegah Penyebaran Virus Corona*” Senin, 16 Mar 2020 11:22 Wib. <https://news.detik.com/berita/d-4940726/tentang-social-distance-cara-pemerintah-cegah-penyebaran-virus-corona>, diakses tanggal 06 Mei 2020, 22:10 Wib

sejauh ini memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena virus corona yaitu sekitar lebih dari 233 juta siswa.

Unesco melansir laporannya terkait beberapa negara yang “melibur”kan sekolahnya. Saat ini total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. China sejauh ini memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena virus corona yaitu sekitar lebih dari 233 juta siswa. Direktur Jenderal Unesco, Audrey Azoulay dalam sebuah pernyataan menegaskan, Unesco bersama setiap negara-negara bekerja sama untuk memastikan kesinambungan pembelajaran bagi semua, terutama anak-anak dan remaja yang kurang beruntung yang cenderung paling terpukul oleh penutupan sekolah.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Covid-19 dan Dampaknya

Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris: *World Health Organization*, sering disingkat WHO) pada pertengahan Maret 2020, menetapkan Covid-19 sebagai pandemi yang berdampak di banyak sektor kehidupan di dunia, termasuk dalam dunia pendidikan. Terkait hal tersebut, pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan enam kebijakan di bidang pendidikan di masa darurat Covid-19. Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa kebijakan yang dihasilkan tersebut telah melalui sejumlah proses pertimbangan.

Salah satu dari enam kebijakan pendidikan adalah pelaksanaan belajar yang dilakukan dari rumah.<sup>5</sup> Proses belajar dari rumah ini meliputi beberapa aspek diantaranya:

- a. Pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic Covid-19
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.

Guna mendukung pembelajaran jarak jauh dalam kebijakan Belajar dari Rumah, Kemendikbud menghadirkan Program “Belajar dari Rumah” di TVRI. Pembelajaran jarak jauh melalui media televisi nasional itu diperuntukkan bagi PAUD, SMP, SMA, SMK, guru, dan orang tua. Tak hanya mendukung jalannya Program “Belajar dari Rumah” di TVRI, Kemendikbud juga ikut

---

<sup>4</sup>Lihat: [https://www.pasundanekspres.co/opini/pandemi-corona-dan-dampak-terhadap-dunia-pendidikan/06 Mei 2020, 22:35 Wib](https://www.pasundanekspres.co/opini/pandemi-corona-dan-dampak-terhadap-dunia-pendidikan/06%20Mei%2020,22:35%20Wib)

<sup>5</sup> Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (tanggal 24 Maret 2020)

mengapresiasi tontonan informatif yang dihadirkan sebagai apresiasi budaya Indonesia di masa pandemi Covid-19. Program “Belajar dari Rumah” tayang setiap hari pukul 08.00-23.00 Wib.

Berjalannya kebijakan tersebut terdapat beberapa kendala yang harus segera dibenahi untuk mengefektifkan program belajar dari rumah. Setidaknya itu terlihat dari jumlah pengaduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan hasil rilis Survey yang dilakukan KPAI terhadap Responden berasal dari 54 kabupaten/kota di 20 provinsi dan sampel diambil dengan teknik acak bertingkat (*multistage random sampling*) diperoleh fakta: (a) Sebanyak 76,7% siswa tidak senang belajar dari rumah. Alasan yang tidak senang, umumnya adalah tugas-tugas yang berat selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Padahal kalau belajar di sekolah, selama ini tidak seberat itu tugasnya. Sedangkan responden yang senang dengan PJJ sebanyak 23,3%. Alasannya, tidak perlu bangun terlalu pagi dan belajar tanpa memakai seragam sekolah.<sup>6</sup>

Tidak hanya itu, ternyata program belajar dari rumah tentu tidak memiliki efektivitas yang sama dibandingkan dengan interaksi langsung di sekolah dengan para guru dan teman sebaya. Kemampuan memahami dan menyerap materi yang diajarkan jauh berkurang mengingat siswa hanya belajar di depan layar HP atau komputer karena proses pemahaman sebuah masalah dapat diperoleh secara maksimal dengan menggunakan lima pancaindra. Keterbatasan belajar di layar mereduksi kemampuan alamiah ini. Interaksi dan diskusi dengan sesama pelajar juga mampu meningkatkan pemahaman atas materi-materi sulit.<sup>7</sup>

Rentetan masalah lain akibat kebijakan program belajar dari rumah adalah persoalan akses internet yang tidak merata di seluruh Indonesia. Akses internet bukan merupakan sesuatu yang gratis, tetapi memerlukan biaya paket data yang harus dikeluarkan. Jika belajar di sekolah, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya akses internet, mungkin cukup biaya transportasi yang tidak terlalu besar. Untuk belajar daring, dalam satu hari bisa diperlukan satu giga byte. Maka dalam satu bulan, bisa dibutuhkan 20-25 Gbt yang bila dirupiahkan mencapai 200 ribu lebih. Dalam situasi ekonomi sulit seperti ini, tambahan biaya menjadi beban berat bagi banyak orang.

Persoalan lain yang muncul akibat Covid-19 adalah biaya operasional sekolah atau perguruan tinggi, terutama bagi lembaga pendidikan swasta. Mereka mengandalkan iuran dari wali murid untuk biaya operasional sekolah. Ketika banyak orang tua berhenti bekerja atau pendapatannya turun, maka ada kemungkinan mereka tidak membayar SPP ke sekolah. Apalagi, siswa belajar di rumah, yang bagi sebagian orang tua dianggapnya tidak perlu membayar SPP karena lebih dominan belajar mandiri.

---

<sup>6</sup> Lihat : <https://www.alinea.id/nasional/kpai-76-7-siswa-tidak-senang-belajar-dari-rumah-b1ZL79tLV>. Lihat Reportase Kompas Com. : ‘*Survei Kemen PPPA: 58 Persen Responden Tak Senang Belajar dari Rumah*’ . 11/04/2020, 13:51 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/13511231/survei-kemen-pppa-58-persen-responden-tak-senang-belajar-dari-rumah>

<sup>7</sup> Lihat : <https://www.nu.or.id/post/read/119716/tantangan-pendidikan-di-tengah-covid-19>, diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan proses pembelajaran di pesantren terganggu. Pesantren menghadapi persoalan yang tak kalah kompleks. Di pesantren, santri tak hanya belajar soal materi-materi yang harus dipahami atau dihapalkan. Namun juga harus menjalankan banyak ritual agama. Ada proses pembelajaran yang awalnya terlihat seperti dipaksa, lama-lama menjadi biasa sampai akhirnya menjadi terbiasa. Santri bangun sebelum subuh untuk shalat tahajud. Sehabis itu, berbagai kegiatan tak berhenti sampai pukul 10 malam ketika mereka istirahat malam. Ritual-ritual seperti ini mampu dijalankan secara efektif di pesantren. Ketika di rumah, maka kurang berjalan maksimal terutama bagi santri junior yang baru masuk pesantren.

Kesiapan para ustadz dan santri dalam pembelajaran daring juga tidak seperti sekolah pada umumnya mengingat para umumnya pesantren melarang penggunaan HP di lingkungan pesantren. Jadi ketika pulang ke rumah, aktivitas pembelajaran di banyak pesantren juga berhenti. Sejumlah kiai pesantren telah mencoba menyelenggarakan pengajian yang disiarkan secara langsung di media sosial, tetapi metode pengajian yang masih konvensional ternyata kurang tepat diterapkan di dunia maya.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya turun tangan. Untuk akses internet, pemberian internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa akan sangat membantu. Anggaran pelatihan prakerja sebesar 20 triliun sebaiknya direalokasikan untuk aktivitas yang jelas-jelas produktif bagi masa depan generasi muda Indonesia dibandingkan dengan didistribusikan untuk pelatihan online yang sesungguhnya bisa diakses secara gratis.<sup>8</sup>

Dalam konteks operasional sekolah, selayaknya terdapat anggaran yang dialokasikan secara khusus. Membantu sekolah jelas memberi dampak yang lebih besar dibandingkan memberikan alokasi dana kepada perusahaan rintisan penyedia pelatihan kerja yang berorientasi mencari keuntungan. Apalagi beberapa perusahaan tersebut berbadan hukum di negara asing. Sangat tidak layak jika anggaran negara yang berasal dari pajak dialokasikan untuk perusahaan asing sementara sekolah yang jelas-jelas mendidik anak bangsa kesulitan memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Dalam kondisi seperti ini, semua pihak; pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat harus saling bahu membahu pihak lain yang terdampak Covid-19. Salah satu kebijakan yang mencerminkan keberpihakannya kepada dunia pendidikan, khususnya pesantren yang sedang terdampak Covid-19 adalah kebijakan Insentif Santri oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi<sup>9</sup> Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan “pemda menyiapkan insentif untuk santri Banyuwangi dari keluarga kurang mampu, baik yang mondok di dalam maupun luar Banyuwangi. Insentif tersebut untuk membantu santri sebagai bekal kembali mondok ketika pandemi Covid-19 berakhir”. Lebih jauh ia menegaskan “sekarang semua pesantren memulangkan santrinya. Ketika pandemi berakhir ke depan,

---

<sup>8</sup> Lihat : <https://republika.co.id/berita/q917ur428/peneliti-soroti-kartu-prakerja-di-tengah-pandemi-covid19> diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

<sup>9</sup> Lihat : <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dampak-covid-19-santri-banyuwangi-dapat-insentif/> diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

para santri tersebut akan kembali ke pesantrennya masing-masing, baik yang berada di dalam maupun luar Banyuwangi. Mereka balik butuh ongkos, butuh bekal, padahal di masa pandemi ini ekonomi keluarganya menyusut, mereka bisa kebingungan cari sugu,”<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menunjukkan keberpihakannya. Demikian juga organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi kepemudaan seperti NU, Muhammadiyah, Fatayat NU, IPNU, ISNU telah melakukan aksi sosialnya membantu masyarakat terdampak Covid-19. Carut marut dunia pendidikan sebagai akibat dari dampak Covid-19 belum memperoleh respon positif dari lembaga mandiri pada dunia pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan. Padahal pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi program kebijakan belajar di rumah, salah satunya adalah dengan menghadirkan fungsi dan peran Dewan Pendidikan Daerah melalui langkah nyata untuk memberikan opsi pembelajaran yang mampu melahirkan *output* pendidikan yang lebih berkualitas. Fungsi dan peran yang bisa dijalankan : (a) sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) bagi pemerintah daerah dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya pada masa pandemic Covid-19; (b) sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik finansial, pemikiran maupun tenaga bagi eksekutif dalam penyelenggaraan pendidikan ; (c) sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*) bagi kebijakan pendidikan pemda ; dan sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) atas kebijakan yang diimplementasikan oleh eksekutif dan legeslatif<sup>12</sup>

### **Mendiskusikan Mutu Pendidikan**

Pada sebagian masyarakat sering kali terjadi salah persepsi ketika membicarakan kualitas atau mutu. Salah persepsi itu akan menjadi *underestimated* ketika dikaitkan dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan acapkali dibubungkan dengan pendidikan elite dan mahal. Padahal mutu suatu pendidikan bergaris lurus dengan lulusan lembaga pendidikan sesuai dengan harapan pengguna output pendidikan.

Realitas tersebut dipertegas oleh Suderajat dalam pernyataannya, bahwa saat ini pendidikan bermutu atau berkualitas seakan bersinonim dengan pendidikan elite dan mahal, pada tidak selalu yang mahal itu bermutu, meskipun disadari bahwa diperlukan adanya komponen pendidikan yang minimal sesuai dengan standar kebutuhan bagi penyelenggara pendidikan bermutu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Lihat : UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 56

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cemas Grafika, 2005), hal. 142

Urgensi mutu buka milik dunia bisnis semata, tetapi secara spesifik sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu, melalui lulusan yang bermutu akan tersedia sumber daya manusia yang bermutu.

Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia cukup kompleks, baik yang terkait dengan piranti *input*, proses maupun *output*, bahkan sampai pada tataran *outcome*. Kompleksitas tersebut digambarkan oleh Sukmadinata, bahwa masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, mutu profesionalisme dan kinerja guru, dan lain-lain. Mutu-mutu tersebut terkait dengan manajerial para pemimpin pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, dan fasilitas pendidikan, media dan sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan<sup>14</sup>

Kompleksitas semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut akhirnya berujung pada rendahnya mutu lulusan. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu rendah, akibatnya sebagian besar tenaga kerja Indonesia tidak dapat terserap dengan baik oleh dunia kerja yang ada karena tidak memiliki kompetensi/kemampuan yang sesuai dengan harapan lembaga penerima tenaga kerja tersebut.

Sejalan dengan era desentralisasi dan permasalahan mutu pendidikan tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain ; terus mengupayakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkesinambungan.<sup>15</sup>

Guna meretas benang kusut rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, dalam pandangan penulis minimal harus melakukan reformasi pada 3 (tiga) aspek fundamental, yaitu (a) reformasi manajemen pendidikan, (b) perombakan pendekatan sistem pembelajaran, dan (c) peningkatan peran serta *stakeholder* pendidikan.

Reformasi manajemen dalam pendidikan seringkali mengadopsi sistem manajemen Total Quality Management (TQM) dari dunia bisnis dan ekonomi. Paradigma TQM atau Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha pendidikan yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Tujuan utama TQM pendidikan adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi dan proses pengadaan pelayanan, sehingga lembaga penyedia pelayanan (baca :

---

<sup>14</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, Ahman dan Ayi Novi Jami'at, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah : Konsep, Prinsip, dan Instrumen*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008) ,Cet. II, hal.72

<sup>15</sup> Lihat : *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* Nomor 20 tahun 2003, konsideran C

lembaga pendidikan) bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan pelanggan.<sup>16</sup>

Manfaat utama penerapan TQM pada dunia pendidikan sebagai sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan pendidikan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan meningkatkan kepuasan pelanggan pendidikan. Sebagai tambahan, manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, semangat dan rasa percaya diri di kalangan staf lembaga pendidikan, perbaikan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan produktifitas dan efisiensi pelayanan publik.<sup>17</sup>

Implementasi TQM pada lembaga pendidikan didasarkan pada prinsip : fokus pada pelanggan, perbaikan proses, keterlibatan total, dan kepemimpinan lembaga pendidikan. Apabila implementasikan pada suatu sekolah maka akan melahirkan konsep sekolah bermutu (unggul). Kepala Sekolah perlu memahami TQM sebagai suatu falsafah, metode, teknik dan strategi manajemen untuk perbaikan mutu sekolah, karena kinerja organisasi sekolah senantiasa dinilai masyarakat dalam situasi yang semakin maju seperti sekarang ini. Kepala sekolah sebagai manajemen puncak memegang berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan implementasi TQM di sekolah.

Guna terciptanya lembaga pendidikan bermutu, maka sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari proses pendidikan diperlukan perombakan di dalamnya. Selama ini strategi pembelajaran di lembaga pendidikan (baca : pendidikan formal) didominasi oleh paham strukturalisme, objektivisme dan behavioristic, yaitu suatu paham yang memandang lembaga pendidikan formal hanya bertujuan agar siswa dapat mengingat informasi factual. Buku teks dirancang, siswa diberi informasi, lalu terjadilah memorisasi.<sup>18</sup> Pembelajaran diimplementasi pada wahana miskin variasi, berbasis pada standart pembelajaran yang kaku. Peserta didik dievaluasi atas dasar akumulasi pengetahuan yang telah diperolehnya, sehingga orang tua tidak mempunyai variasi pilihan atas jasa pelayanan bagi anak-anaknya, sumber-sumber pembelajaran di dunia nyata dan unggulan daerah tidak termanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, dan lulusan hanya mampu menghafal tanpa memahami.<sup>19</sup>

Menyadari hal tersebut, maka mendesain kurikulum yang bertajuk *Broad Based Education/BBE* (Pendidikan Berbasis Luas) yang berorientasi pada *Life Skill* (kecakapan hidup).<sup>20</sup> BBE hadir sebagai salah satu upaya dari berbagai usaha memecahkan persoalan pendidikan yang selalu menjadi sorotan terutama kurangnya kemampuan pendidikan melahirkan SDM yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan

---

<sup>16</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riyad i dan Fahrurrozi (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), hal. 73.

<sup>17</sup> Umi Hanik, *Implementasi Total Quality Management dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan* (Semarang : RaSAIL Media Group, 2011), hal. 14

<sup>18</sup> Paul Suparno dan Rohandi. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*, (Jakarta : Kanisius, 2000), hal. 15

<sup>19</sup> Tim Broad Based Educational Depdiknas, *Pola Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Pendidikan berbasis Luas*, (Surabaya : Surabaya Intellectual Club (SIC), 2010), hal. 2

<sup>20</sup> E.Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 57

kecilnya daya serap tenaga kerja Indonesia yang berdampak pada menumpuknya pengangguran pada berbagai jenjang pendidikan. Di samping itu, merekapun tidak memiliki keterampilan praktis menciptakan usaha mandiri, sehingga sangat mengganggu kesetabilan kehidupan.

BBE merupakan suatu pendekatan yang aplikasinya dapat dilakukan melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) yang berbasis masyarakat. Life skills merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan bekerjasama, menjadi warga negara yang bertanggungjawab, memiliki kecakapan untuk bekerja, memiliki karakter, dan cara-cara berpikir analitis dan logis. Selain itu cakupan *life skills* amat luas, meliputi keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan mengelola waktu dan sumber, serta keterampilan merencanakan. Pengembangan program life skills pada umumnya bersumber pada kajian bidang: dunia kerja (*the world of work*), keterampilan hidup praktis (*practical living skills*), pengelolaan dan pertumbuhan SDM (*personal growth and management*), dan keterampilan sosial (*social skills*).<sup>21</sup>

Pendidikan kecakapan hidup bukanlah membentuk mata pelajaran-mata pelajaran baru, tetapi mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Ada tiga prinsip mendasar dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup, yaitu: (1) tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini, (2) tidak harus dengan mengubah kurikulum, sebab yang justru diperlukan adalah pensiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup, dan (3) etika sosio religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan. Bertolak dari ketiga prinsip tersebut, maka pengembangan kecakapan hidup tidak dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang ada selama ini dengan prinsip-prinsip yang sama di atas.<sup>22</sup>

Peningkatan peran serta *stakeholder* pendidikan merupakan tajuk ketiga (terahir) dari iktisad peningkatan mutu pendidikan pada paper ini. Masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Urgensi peran dimaksud adalah peran kemitraan. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap pendidikan, sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan. Masyarakat sama sekali tidak bisa terlepas dari proses-proses pendidikan. *Pertama*, proses pendidikan itu terjadi di masyarakat yang oleh karena itu dinamikanya harus mengikuti irama kebutuhan kehidupan masyarakat. *Kedua*, potensi masyarakat yang sangat besar harus diberdayakan untuk kepentingan pengembangan dunia pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tim Broad Based Educational Depdiknas, *Op.Cit.* hal.7

<sup>22</sup> Djoko Saryono, *Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsepsi dan Implementasinya di Sekolah*. Makalah dalam Workshop Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah Berorientasi Kecakapan Hidup di Jawa Timur, 11 November 2002, Universitas Negeri Malang.

<sup>23</sup> Lihat : <https://masrukhiunnes.wordpress.com/2015/01/26/efektifitas-peran-serta-masyarakat-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/>, diakses tanggal 14 Mei 2020: 19.20 Wib

Masyarakat dan peningkatan mutu sekolah merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan karena, salah satu prinsip yang ada dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu adanya Partisipasi/ peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah/ pendidikan. Wujud dari partisipasi tersebut antara lain: partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, dan partisipasi kultural<sup>24</sup>

### Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan

Pemahaman paradigmatik bagi komunitas pendidikan, baik dari sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan dan komite sekolah memiliki urgensi tinggi, mengingat keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kurun waktu yang panjang tidak memiliki fungsi dan tugas yang berarti bagi penentuan kebijakan pendidikan, sehingga berbagai kebijakan pendidikan hanya dibuat oleh internal dari komunitas pendidikan itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan sekolah.<sup>25</sup>

Ada beberapa akibat dari kebijakan tersebut. *Pertama*, lembaga di tingkat pusat yang tidak mampu memahami secara merata dan menyeluruh ke seluruh daerah, sehingga kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada aspirasi komunitas pendidikan di tingkat bawah; *kedua*, aspirasi masyarakat dan komunitas pendidikan di tingkat bawah, yang senyatanya terus berkembang dan berubah, tidak pernah terakomodasi dalam berbagai kebijakan yang dibuat; dan *ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan otonomi pendidikan, sebenarnya masyarakat menunggu datangnya kebijakan pendidikan yang sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tingkat komunitas bawah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicari alternatif mengatasi masalah pendidikan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicari alternatif mengatasi masalah pendidikan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan

Salah satu wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam dunia pendidikan adalah melalui Dewan pendidikan (DP) dan komite sekolah, baik sebagai pengurus maupun sebagai tempat penyaluran aspirasi dan gagasan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,<sup>26</sup> serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat : <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/pengelolaan-partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan/> diakses tanggal 14 Mei 2020: 20.15 Wib

<sup>25</sup> Siskandar, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14 No. 37, tahun 2008, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia, hal. 5

<sup>26</sup> Lihat : PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

<sup>27</sup> Lihat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Sinergisitas antara Dewan Pendidikan, Komite sekolah, serta satuan pendidikan tersebut bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan sudah ada begitu saja (*taken for granted*), tetapi perlu diberdayakan.<sup>28</sup> Kepmendiknas No. 044/U/2002, Lampiran I menjelaskan bahwa dewan pendidikan berperan sebagai: pemberi pertimbangan (*advisory agency*); pendukung (*supporting agency*); pengontrol (*controlling agency*), serta sebagai mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan PP No 66 Tahun 2010 Pasal 192, ayat (2) yang mengatur bahwa dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Kalaulah Dewan Pendidikan sudah terbentuk di suatu daerah, keberadaannya jangan hanya dijadikan “setempel” Pemerintah Daerah, tetapi harus diberdayakan sesuai dengan amanat peraturan di atas. Paling tidak 3 (tiga) alasan mendasar mengapa Dewan Pendidikan harus diberdayakan. *Pertama*, tuntutan peningkatan mutu suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terus menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyelenggara dan pengelolaan pendidikan tidak lagi asal jadi atau statis tanpa perbaikan berkesinambungan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, orientasi dan tekad baru dalam kondisi dana yang belum terpenuhi, itulah tantangan yang nyata dihadapi pemerintah. Orientasi baru yang lebih demokratis dan kewajiban untuk mengkaji agar sesuai dengan tuntutan desentralisasi kemudian ditata oleh pemerintah daerah dengan cara membangun *good governance* yang memungkinkan pemerintah membagi kewenangannya, sehingga beban pembiayaan, hak dan tanggungjawab pendidikan bisa terdistribusikan kepada masyarakat dan swasta. *Ketiga*, di tengah anggaran negara yang belum memadai, maka pemerintah memungkinkan membagi beban tata-kelola kepada lini manajemen yang lebih rendah (provinsi dan terutama kabupaten/ kota, serta sekolah) dan masyarakat. Dengan demikian, Dewan Pendidikan ini diharapkan dapat hadir sebagai perwujudan adanya *good education governance*, yaitu dikaitkan dengan “berbagi tanggung jawab” serta memungkinkan peran serta publik dalam memperbaiki mutu pendidikan.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, terbitnya peraturan yang menghendaki intensitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan pembentukan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkat.

---

<sup>28</sup> Moch. Alip dan Sunarto, “Pelaksanaan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK di DIY”, *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, No. 1, Tahun XI, 2008, Yogyakarta: UNY, hal 137.

<sup>29</sup> Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Kemendikbud.go.id , 2012 Vol-18 No 1. hal. 34-44

Implementasi dari hal tersebut belum berjalan maksimal, Covid-19 hadir dengan segala dampak negatifnya. Dampak itu hadir sampai pada titik nadir dengan meluncurkan kebijakan “belajar dari rumah”. Kendatipun demikian, ihtiar untuk meningkatkan-minimal mempertahankan-mutu pendidikan tidak boleh pudar karena kehadiran Covid-19. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah seharusnya bisa menghadirkan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, mengingat ia merupakan bagian integral dari masyarakat. Untuk itu semua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus tetap berdaya dan diberdayakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku-Jurnal Referensi*

- Alip , Moch. Alip Sunarto, 2008 “Pelaksanaan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK di DIY”, *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, No. 1, Tahun XI, Yogyakarta: UNY*
- Hanik, Umi, (2011), *Implementasi Total Quality Management dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan* ,Semarang : RaSAIL Media Group
- Hendarman, (2012), Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Kemendikbud.go.id , Vol-18 No 1.*
- Mulyasa, E, (2009) *Kurikulum yang Disempurnakan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sallis, Edward, (2006) *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi , Jogjakarta: IRCiSoD
- Saryono, Djoko, (2002) *Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsepsi dan Implementasinya di Sekolah*. Makalah dalam Workshop Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah Berorientasi Kecakapan Hidup di Jawa Timur, 11 November 2002, Universitas Negeri Malang.
- Siskandar, (2008) ”Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 14 No. 37*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia
- Suderajat, Hari, (2005), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Cemas Grafika
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Ahman dan Ayi Novi Jami’at (2008), *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah : Konsep, Prinsip, dan Instrumen*, Bandung : PT Refika Aditama
- Suparno, Paul dan Rohandi.(200) *Reformsi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*, Jakarta : Kanisius
- Tim Broad Based Educational Depdiknas, (2010) *Pola Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Pendidikan berbasis Luas*, Surabaya : Surabaya Intellectual Club

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Peraturan Pemerintah Noomor m66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (tanggal 24 Maret 2020)

### ***Internet-Website***

<https://masrukhiunnes.wordpress.com/2015/01/26/efektifitas-peran-serta-masyarakat-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/>, diakses tanggal 14 Mei 2020: 19.20 Wib.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/pengelolaan-partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan/> diakses tanggal 14 Mei 2020: 20.15 Wib.

<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dampak-covid-19-santri-banyuwangi-dapat-insentif/> diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

<https://republika.co.id/berita/q917ur428/peneliti-soroti-kartu-prakerja-di-tengah-pandemi-covid19> diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

<https://www.alinea.id/nasional/kpai-76-7-siswa-tidak-senang-belajar-dari-rumah-b1ZL79tLV>). diakses 11 Mei 2020 : 05: 40 Wib

<https://www.kompas.com>: ‘*Survei Kemen PPPA: 58 Persen Responden Tak Senang Belajar dari Rumah*’ . 11/04/2020, 13:51 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/13511231/survei-kemen-pppa-58-persen-responden-tak-senang-belajar-dari-rumah>

<https://www.nu.or.id/post/read/119716/tantangan-pendidikan-di-tengah-covid-19>, diakses 11 Mei 2020 : 05:58 Wib

<https://www.pasundanekspres.co/opini/pandemi-corona-dan-dampak-terhadap-dunia-pendidikan/06> Mei 2020, 22:35 Wib

<https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4951544/social-distancing-diubah-jadi-physical-distancing-cegah-corona-ini-maksudnya>, diakses tanggal 06 Mei 2020, 21:20 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-4940726/tentang-social-distance-cara-pemerintah-cegah-penyebaran-virus-corona>, diakses tanggal 06 Mei 2020, 22:10 Wib